



# Risalah Kebijakan

• • • • Nomor 7, September 2022



## Urgensi Penguatan Pemahaman Sekolah dan Kapasitas Guru BK Terkait Penghapusan Jurusan/Peminatan di Jenjang SMA pada Kurikulum Merdeka



### Ringkasan

Kurikulum Merdeka yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran membawa beberapa perubahan pada struktur kurikulum setiap jenjang. Pada jenjang SMA, perubahan tersebut salah satunya tampak dari dihapuskannya sistem pemilihan jurusan/peminatan menjadi pemilihan mata pelajaran agar lebih bisa mengakomodasi minat, bakat, dan aspirasi siswa. Dalam konteks ini, Guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki peran penting untuk dapat mengarahkan siswa menentukan mata pelajaran pilihan berdasarkan minat, bakat, dan aspirasinya.

Pada awal 2022, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek telah melakukan studi untuk melihat kesiapan sekolah menghadapi perubahan ini pada pelaksana Program Sekolah Penggerak. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan sekolah, antara lain melalui sosialisasi, pemetaan minat dan bakat siswa, serta pendampingan dan konsultasi siswa. Namun demikian, beberapa tantangan juga teridentifikasi, antara lain minimnya jumlah guru BK, rendahnya pemahaman guru BK terhadap penghapusan jurusan, serta kekhawatiran perubahan mata pelajaran pilihan oleh siswa.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, upaya terpenting yang dapat dilakukan adalah penguatan kapasitas guru BK dalam mendampingi siswa, di antaranya melalui penyediaan panduan pendampingan kepada siswa, pelatihan/*workshop* pemetaan minat, bakat, dan aspirasi siswa, serta optimalisasi peran komunitas belajar. Selain itu, perlu peningkatan jaminan layanan bimbingan konseling kepada siswa baik dengan mencukupi kebutuhan guru BK maupun mendorong sekolah bermitra dengan pihak eksternal (misalnya: universitas, lembaga profesi psikologi, dll).

## Konteks

Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, perubahan kurikulum sering kali dilakukan untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Dalam sebuah buku yang ditulis Wiyopranoto, Ki Hadjar Dewantara mendokumentasikan perubahan kurikulum yang dimaknai sebagai kodrat alam untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan peserta didik agar lebih kontekstual (sesuai zamannya) (Wiyopranoto dkk., 2017). Pandemi COVID-19 menguatkan pandangan Ki Hajar Dewantara terkait pentingnya kurikulum yang adaptif sesuai dengan perkembangan zaman tersebut.

Dari hasil riset yang dilakukan SMERU, pandemi menyebabkan *learning loss* terutama pada siswa yang kurang beruntung. *Learning loss* selama pandemi disebabkan oleh tiga hal, yaitu: a) guru kebingungan selama belajar jarak jauh, terutama terkait pendampingan pembelajaran, b) pembelajaran satu arah lazim dilakukan melalui aplikasi digital, dan c) siswa merasa frustrasi karena tidak dapat belajar dengan optimal (SMERU, 2020). Hasil riset tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara guru dan kebutuhan belajar siswa.

Jauh sebelum pandemi COVID-19, permasalahan rendahnya kualitas pembelajaran di Indonesia sebenarnya telah tampak dari hasil belajar siswa yang tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Laporan PISA tahun 2018 mengungkapkan bahwa nilai literasi siswa pada 2018 setara dengan tahun 2000, yaitu pada skor 371. Pada tahun 2022, World Bank memprediksi nilai belajar siswa di Indonesia akan turun 21 poin akibat pandemi (Yarrow, dkk., 2020). Rendahnya kualitas hasil belajar siswa ini setidaknya terjadi akibat dua hal. *Pertama*, kurikulum yang bersifat sentralistik dan kaku sehingga tidak sesuai dengan kondisi siswa yang beragam dan kurang kontekstual bagi dunia siswa. *Kedua*, guru hanya akan menghasilkan lulusan siswa yang sesuai dengan yang tercantum dalam buku teks tanpa memberikan ruang untuk berkembang (Pritchett, 2013). Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupaya memulihkan krisis belajar siswa melalui perubahan kurikulum, termasuk di jenjang SMA.

Pada Kurikulum Merdeka, peserta didik di jenjang SMA diberi kesempatan untuk menggali minat dan bakat siswa serta memberikan ruang aspirasi dalam menentukan mata pelajaran yang akan diambil. Peminatan siswa tidak didasarkan atas *tracking* atau mata pelajaran “sejenis”, namun siswa dapat memilih mata pelajaran lintas rumpun mata pelajaran. Dengan demikian, perubahan yang signifikan dalam struktur kurikulum pada jenjang SMA adalah hilangnya program IPA, IPS, dan Bahasa (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022). Kurikulum Merdeka juga menawarkan fleksibilitas dalam memilih tujuan pembelajaran dan penyederhanaan materi ajar sehingga guru lebih leluasa untuk memberikan pendidikan yang adaptif sesuai dengan perubahan zaman dan lebih bermakna.

Penghapusan jurusan pada struktur kurikulum SMA setidaknya memberi manfaat berupa kebebasan kepada siswa untuk memilih jurusan yang paling sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan begitu, pemberlakuan Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa dapat lebih mengasah kemampuan sesuai dengan jalur yang dipilih, dengan harapan siswa dapat lebih fokus dan menggali potensi masing-masing sedalam mungkin. Untuk itu, pada tahap ini siswa membutuhkan bimbingan dalam pemilihan karier yang diinginkan, di mana mereka akan sampai pada keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan kapasitas bawaan mereka, hak istimewa pendidikan yang ditawarkan kepada siswa, dan sumber daya lain yang disediakan masyarakat agar mereka lebih efisien dan efektif.

Studi yang dilakukan oleh Penedilla, dkk. (2017) juga menyatakan bahwa siswa SMA terkadang belum bisa menentukan pilihan karier mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain usia yang belum matang, gender, sosial ekonomi, dan latar belakang keluarga. Selain itu, ketidaktahuan siswa terkait pilihan-pilihan karier juga menjadi penyebab keterbatasan kemampuan siswa dalam memilih karier yang tepat. Melihat banyaknya hal yang perlu menjadi

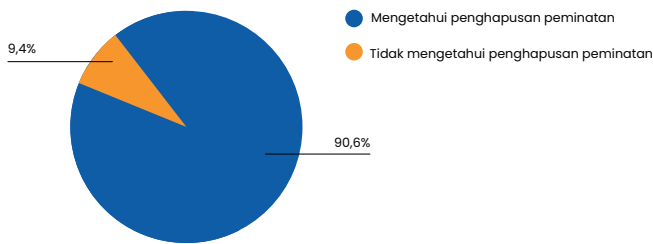
pertimbangan siswa dalam memilih jenjang karier mengantarkan kita pada satu peran penting, yaitu hadirnya guru bimbingan konseling (BK) dalam membantu siswa menetapkan berbagai alternatif pilihan karier. Siswa diharapkan dapat berkonsultasi dengan guru BK sehingga mampu mengoptimalkan potensi diri.

Dalam Kurikulum Merdeka, peran guru BK bertransformasi dari yang sebelumnya cenderung hanya pada penyelesaian masalah kenakalan siswa (*psychological problems*) menjadi bimbingan kepada siswa untuk meningkatkan pemahaman terhadap bidang studi dan meningkatkan kompetensi peserta didik serta kemandirian untuk mewujudkan diri (*self actualization*) dan pengembangan kapasitasnya (*capacity development*) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi siswa (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022). Dengan kondisi demikian, guru BK memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Tujuan utama layanan BK di sekolah adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karier individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Penguatan peran guru BK ini merupakan kesempatan untuk mereposisi program bimbingan dan konseling sebagai bagian penting dari misi pendidikan (sekolah) dalam mendukung pencapaian prestasi akademik dan fasilitasi tugas perkembangan siswa di berbagai aspek. Untuk itu, melihat peran guru BK dalam impementasi pembelajaran menjadi sangat penting.

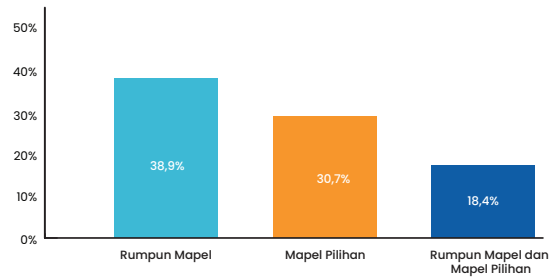
Kurikulum Merdeka—yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Kurikulum Prototipe—sudah diimplementasikan secara terbatas pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 1. Untuk melihat implementasi kurikulum tersebut, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek melakukan evaluasi adaptasi Kurikulum Merdeka pada Program Sekolah Penggerak, khusus di jenjang SMA terkait penghapusan jurusan/peminatan. Evaluasi dilakukan di bulan Januari 2022 dengan sasaran guru BK untuk mengetahui pemahaman, persiapan, dan potensi masalah yang mungkin akan dihadapi oleh guru BK. Metode dalam evaluasi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dilakukan melalui survei telepon pada tanggal 19-28 Januari 2022. Sasaran dalam survei ini merupakan populasi SMA Program Sekolah penggerak (PSP) Angkatan 1 sebanyak 381 yang tersebar di 34 provinsi baik di wilayah tertinggal maupun nontertinggal. Responden dalam survei ini merupakan perwakilan guru BK di setiap sekolah dengan kriteria telah mengikuti pelatihan 74 JP dengan capaian *response rate* sebesar 64%, yaitu sebanyak 244 responden guru BK.

### **Kesimpulan #1: Pemahaman guru BK terkait penghapusan jurusan masih rendah.**

Sebagian besar (90,6%) responden guru BK menyatakan telah mengetahui rencana penghapusan penjurusan/peminatan di kelas XI dan XII SMA. Meskipun sebagian besar responden sudah mengetahui adanya kebijakan tersebut, namun hanya sedikit guru BK (18,4%) yang memiliki pemahaman yang tepat terkait konsep penghapusan jurusan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Aspek pemahaman ini digali melalui pengetahuan responden terkait jumlah mapel pilihan dan rumpun mapel yang diambil oleh siswa dengan menggunakan skema peminatan berbasis mapel yang diberlakukan pada Kurikulum Merdeka.



**Grafik 1** Guru BK yang Mengetahui Penghapusan Jurusan/Peminatan pada kelas XI dan XII SMA



**Grafik 2** Pemahaman Guru BK terkait Jumlah Rumpun Mata Pelajaran Minimal dan Jumlah Mata Pelajaran Pilihan yang Harus Diambil Siswa Kelas XI dan XII SMA

Dari hasil survei, sebagian besar guru BK tidak memahami pilihan minimum jumlah rumpun dan mata pelajaran yang akan diambil oleh siswa (Grafik 2). Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum guru BK belum memahami adanya pemilihan mata pelajaran bagi siswa kelas XI dan XII dalam Kurikulum Merdeka. Kondisi ini menjadi tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada kelas XI jenjang SMA yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2022/2023. Jika masih banyak sekolah yang belum memahami aspek umum terkait mata pelajaran pilihan bagi siswa, maka gagasan kurikulum untuk memberikan ruang kebebasan siswa memilih mata pelajaran menjadi terhambat.

Meskipun idealnya guru BK mendampingi siswa dalam proses mengidentifikasi minat dan bakat dengan atau tanpa adanya kurikulum, namun ketidakpahaman terkait perubahan struktur kurikulum ini akan menyebabkan kebingungan siswa selama memilih mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran.

**Kesimpulan #2: Tidak ada korelasi antara pemahaman dengan persiapan yang dilakukan guru BK.**

Data survei juga menunjukkan bahwa mayoritas guru-guru BK (87,5%) dari 244 responden telah melakukan persiapan terkait penghapusan peminatan/jurusan mata pelajaran pada kelas XI dan kelas XII. Persiapan yang dilakukan oleh guru BK yang paling banyak dilakukan adalah menyiapkan instrumen penggalian minat (70,1%). Bentuk persiapan lain yang juga banyak dilakukan yaitu mendampingi dan melayani konsultasi siswa kelas X (63,8%), sosialisasi kepada siswa kelas X (61,1%), memberikan layanan bimbingan karier (59,7%), dan melakukan analisis mata pelajaran pilihan yang diminati siswa (52%). Selain itu, sebagian guru BK juga melakukan pemetaan minat siswa dengan melibatkan psikolog profesional (43,4%). Persiapan yang dilakukan oleh guru BK semestinya didasarkan pada pemahaman yang baik tentang konsep penghapusan jurusan sehingga langkah persiapan tersebut dapat memberikan gambaran utuh terkait perubahan struktur kurikulum SMA dan memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan.

Sayangnya analisis korelasi spearman yang dilakukan para guru menyatakan tidak ada hubungan antara isu penghapusan jurusan dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh guru BK. Analisis korelasi spearman antara isu penghapusan jurusan dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh guru BK menunjukkan hasil yang tidak signifikan ( $p\text{-value}=0,232>5\%$ ) pada taraf nyata 5%. Artinya, tidak ada hubungan antara pemahaman isu penghapusan jurusan dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh guru BK (penyiapan instrumen, analisis mapel, pendampingan dan layanan konsultasi, dan bimbingan karier). Hasil analisis ini berpotensi pada dua hal, *pertama*, ketidakpahaman guru BK bisa berakibat pada belum adanya perubahan paradigma penghapusan jurusan baik pada siswa maupun guru BK dalam melihat asesmen peminatan siswa. Alih-alih mengarahkan siswa untuk memilih mapel pilihan sebagaimana yang

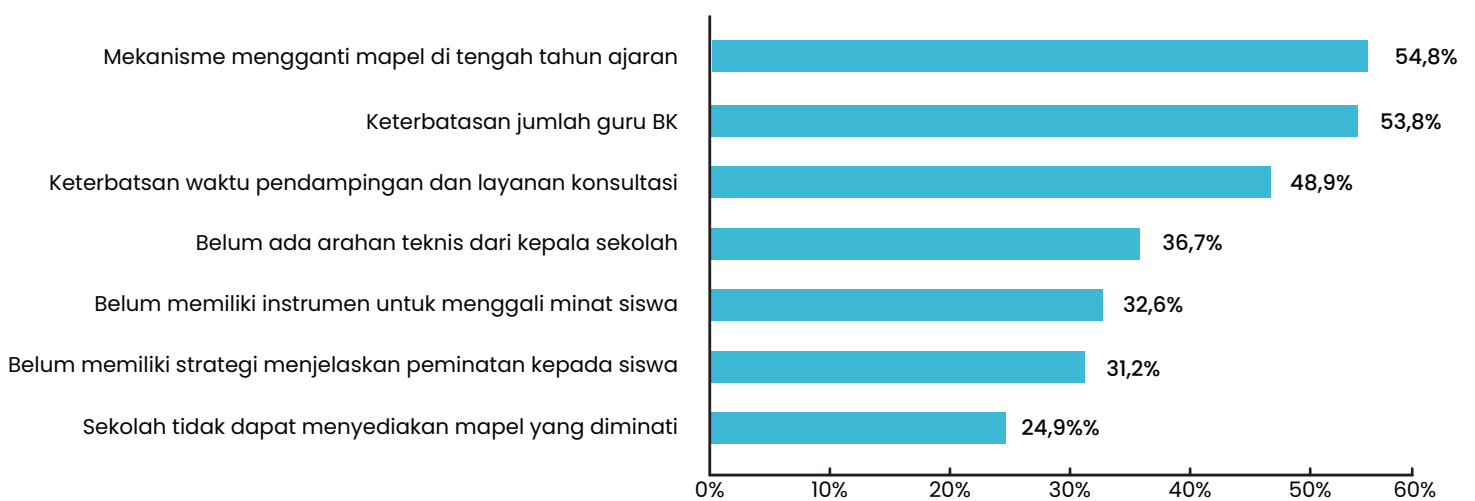
diharapkan pada kurikulum, guru BK bisa saja mengarahkan siswa untuk tetap memilih rumpun mapel sesuai dengan desain kurikulum sebelumnya. Asumsi *kedua*, penyiapan yang dilakukan guru BK tidak dilakukan atas dasar mempersiapkan siswa untuk memilih mata pelajaran, tetapi hanya didorong oleh desain program yang mengharuskan guru BK melakukan berbagai asesmen dan kegiatan lain tanpa mengetahui maknanya. Apabila dua asumsi tersebut benar, maka pelatihan Komite Pembelajaran dengan sasaran guru BK belum berhasil mengubah paradigma dan pemahaman mereka.



Grafik 3 Persiapan yang Dilakukan oleh Guru BK (n=221)

### Kesimpulan #3: Mekanisme mengganti minat mata pelajaran menjadi kekhawatiran guru BK.

Dari sudut pandang responden guru BK, potensi masalah yang paling dikhawatirkan muncul dari implementasi penghapusan peminatan/jurusan ini yaitu mekanisme siswa jika akan melakukan perubahan/mengganti mata pelajaran pilihan di tengah tahun ajaran berlangsung (54%). Kekhawatiran ini dilandasi dengan asumsi bahwa ada kemungkinan sebagian siswa belum memahami sepenuhnya minat dan bakatnya sehingga ada kemungkinan juga salah menentukan rumpun mata pelajaran. Jika hal ini terjadi, guru BK berharap tetap ada mekanisme yang bisa mewadahi perpindahan/penggantian rumpun mata pelajaran pilihan ini.



Grafik 4 Potensi Permasalahan yang Dihadapi Guru BK (n=221)

## #Kesimpulan 4: Minimnya jumlah guru BK di satuan pendidikan menjadi potensi rendahnya kualitas pendampingan guru terhadap siswa.

Peran guru BK di jenjang SMA sangat penting, selain untuk bimbingan konseling siswa yang bermasalah juga untuk memberikan bimbingan terkait gambaran peminatan dan karier baik saat memasuki perguruan tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja. Saat ini tidak semua sekolah memiliki guru BK bahkan secara populasi guru BK di Indonesia hanya mencapai 33.000 dari 18,8 juta siswa, artinya rasio guru BK dan siswa 1: 570. Minimnya jumlah guru BK menyebabkan tugas dan fungsi guru BK kurang optimal. Secara umum tugas dan fungsi guru BK dibedakan menjadi dua, yaitu tugas di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas guru BK melakukan layanan mengoptimalkan hasil belajar siswa, pendampingan karier, dan membantu perkembangan peserta didik. Di luar kelas, guru BK memiliki tugas memberikan layanan kepada peserta didik yang bersifat pencegahan dan perbaikan. Minimnya guru BK akan menyebabkan siswa tidak mendapat akses terhadap layanan-layanan tersebut, sehingga hal ini akan berdampak pada sulitnya siswa memahami pilihan karier yang tepat.

## Rekomendasi

Salah satu perubahan yang terjadi dalam Kurikulum Merdeka adalah penghapusan penjurusan/peminatan berdasarkan kelompok mata pelajaran bagi siswa kelas XI dan XII SMA. Dengan perubahan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan kompetensinya berdasarkan minat, bakat, dan aspirasinya. Dalam konteks ini, guru BK memiliki peran yang besar dalam mendampingi siswa untuk mengenali minat, bakat, dan aspirasinya sehingga mampu memilih mata pelajaran yang paling sesuai.

Temuan survei yang dilakukan PSKP dalam persiapan implementasi Kurikulum Merdeka pada kelas XI di atas menunjukkan bahwa secara umum masih terdapat tantangan yang harus segera diatasi terutama dalam memperkuat kapasitas guru BK dalam melakukan pendampingan bagi siswa. Beberapa tantangan tersebut antara lain pemahaman guru BK yang relatif rendah terkait penghapusan jurusan/peminatan pada jenjang SMA, serta masih adanya kebingungan bagaimana strategi pemetaan minat dan pendampingan siswa dalam menentukan mata pelajaran pilihan. Berdasar temuan tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas guru BK antara lain dengan:

### 1. Memberikan penguatan pemahaman terkait urgensi dan mekanisme peminatan mata pelajaran di jenjang SMA pada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Meskipun sudah terdapat mekanisme pelatihan dan pendampingan sekolah dalam hal implementasi Kurikulum Merdeka, namun panduan teknis dan modul yang membantu pemahaman guru terkait peran guru BK dalam memberikan layanan terhadap siswa masih sangat minim. Panduan teknis atau modul praktik baik diperlukan dalam penerapan layanan siswa terutama terkait pendampingan pemilihan mata pelajaran sesuai dengan peminatan karena diharapkan dapat memberikan *insight* kepada guru BK terkait apa yang harus dilakukan di satuan pendidikan.

### 2. Memberikan *workshop* atau pelatihan kepada guru BK terkait pemetaan minat, bakat, dan aspirasi siswa, serta layanan karier bagi siswa.

Sejumlah guru BK mengaku kebingungan dalam penerapan layanan karier terhadap siswa. *Tools assessment* layanan karier diperlukan untuk memberikan panduan kepada guru BK terutama bagi guru yang belum pernah melakukan asesmen peminatan. Pendampingan yang tepat juga dapat membantu mengurangi risiko siswa yang ingin mengganti mapel di tengah semester.

### **3. Mengoptimalkan peran komunitas belajar sebagai ruang sesama guru untuk saling belajar dan berbagi praktik baik.**

Optimalisasi komunitas belajar ini dapat dilakukan melalui pelatihan komunitas belajar baik yang selama ini telah ada (misalnya: MGMP) maupun komunitas baru yang semakin berkembang. Di dalam komunitas belajar ini, guru-guru BK dapat berdiskusi dengan sesama guru terkait berbagai permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan dalam mendampingi siswa. Guru-guru BK yang dianggap lebih mampu juga dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan berdasarkan praktik baik yang dilakukan.

### **4. Mempertimbangkan kecukupan guru BK atau memberikan jaminan kepada siswa untuk mendapatkan bimbingan terkait pengembangan karier mereka di jenjang SMA**

Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan mendorong sekolah berkolaborasi dengan universitas maupun lembaga profesi psikologi.



## Daftar Pustaka

- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. 2022. *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Center on the Developing Child at Harvard University 2016. *Building Core Capabilities for Life: The Science Behind the Skills Adults Need to Succeed in Parenting and in the Workplace*. Retrieved from [www.developingchild.harvard.edu](http://www.developingchild.harvard.edu).
- Penedilla, Jayson., Rosaldo, Lilibeth. 2017. *Factors Affecting Career Preferences Among Senior High School Students In Tacloban City*.
- Pritchett, Lant. 2013. *The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning*. Center for Global Development
- SMERU. 2020. *The COVID-19 Pandemic and Learning Loss*. Jakarta: SMERU
- Wiyopranoto, Suhartono., dkk. 2017. *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yarrow, Noah., Masood, Eema., Afkar, Rythia. 2020. *Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide*. World Bank.

**Risalah Kebijakan** ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
**Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**  
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5736365, 5713827



**Tim Penyusun**

**Indah Pratiwi  
Bakti Utama  
Siti Nur Azizah  
Joko Purnama  
Ika Hijriani**